



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK  
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH  
KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014  
*(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF  
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF  
THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF  
THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, termasuk di Laut Wilayah, untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan garis batas laut wilayahnya melalui perundingan;
  - c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 3 September 2014 di Singapura telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*);
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*);

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*) yang telah ditandatangani pada tanggal 3 September 2014 di Singapura yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

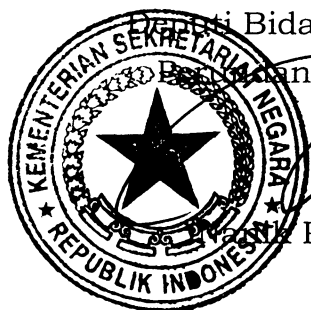
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Asisten Deputi Bidang Hukum dan

Undang-Undang,



Purwanti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK  
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH  
KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014  
*(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF  
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS  
OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF  
THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)*

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Laut Wilayah untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun demikian, di sejumlah Laut Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terdapat wilayah laut yang belum disepakati batasnya dan memerlukan kesepakatan dengan negara tetangga. Salah satu wilayah laut yang perlu ditetapkan batasnya adalah batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura bagian timur yang Indonesia memiliki kedaulatan atasnya.

Sesuai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*), khususnya Bagian II mengenai Laut Wilayah, Indonesia menetapkan batas Laut Wilayah dengan negara tetangganya melalui perundingan untuk memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki batas Laut Wilayah, Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973, dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 yang ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Maret 2009 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dan pada tanggal 3 September 2014 di Singapura, Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Perjanjian pada tanggal 3 September 2014 tersebut bertujuan untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura yang memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi kepentingan Indonesia di Selat Singapura, dan memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan garis batas Laut Wilayah di bagian timur Selat Singapura dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain untuk:

1. menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Republik Singapura di Selat Singapura;

2. memperkuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;
4. memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;
6. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;
7. menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Materi muatan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, antara lain:

1. Garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Bagian Timur Selat Singapura merupakan kelanjutan dari garis batas Laut Wilayah di Bagian Tengah Selat Singapura sesuai dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura Tahun 1973 (Perjanjian Tahun 1973).

2. Garis . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Garis batas Laut Wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura bagian timur dari titik 6 garis batas yang disepakati dalam Perjanjian Tahun 1973 sebagai suatu garis yang terdiri atas garis lurus yang ditarik antara titik koordinat sebagai berikut:

<b>Titik</b>	<b>Lintang</b>	<b>Bujur</b>
6	1°16'10.2" LU	104°02'00.0" BT
7	1°16'22.8" LU	104°02'16.6" BT
8	1°16'34.1" LU	104°07'06.3" BT

3. Garis batas Laut Wilayah kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
4. Letak sebenarnya dari titik koordinat di atas laut sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan ditetapkan dengan suatu cara yang disetujui bersama oleh:
- Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
  - Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

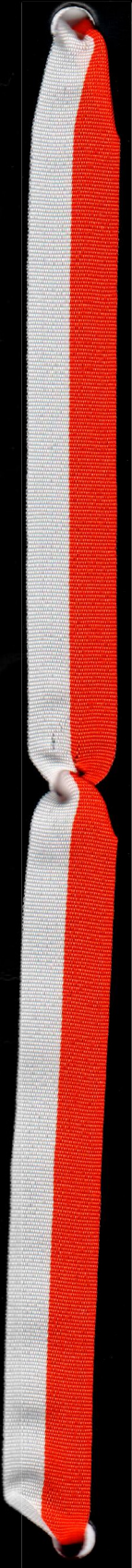
Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.



SALVAY VASKAH RESTO  
CERTIFIED TRUE COPY





**REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN  
ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA  
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA  
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

**REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA,**

**MENGINGAT** bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

**TELAH** menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 1973") dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 2009"),

**MENIMBANG** lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

**BERHASRAT** untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

**DENGAN DEMIKIAN,** berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

## PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran "A"** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

## PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran "B"** pada Perjanjian ini.

### **PASAL 3**

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

### **PASAL 4**

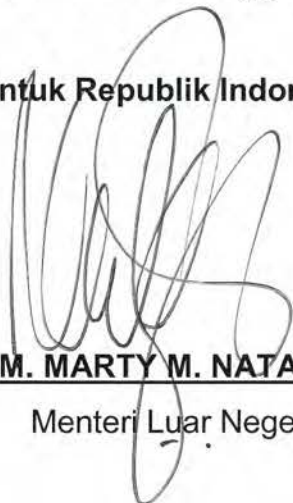
Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

### **PASAL 5**

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

**DIBUAT DALAM RANGKAP DUA** di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Untuk Republik Indonesia**



**DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA**

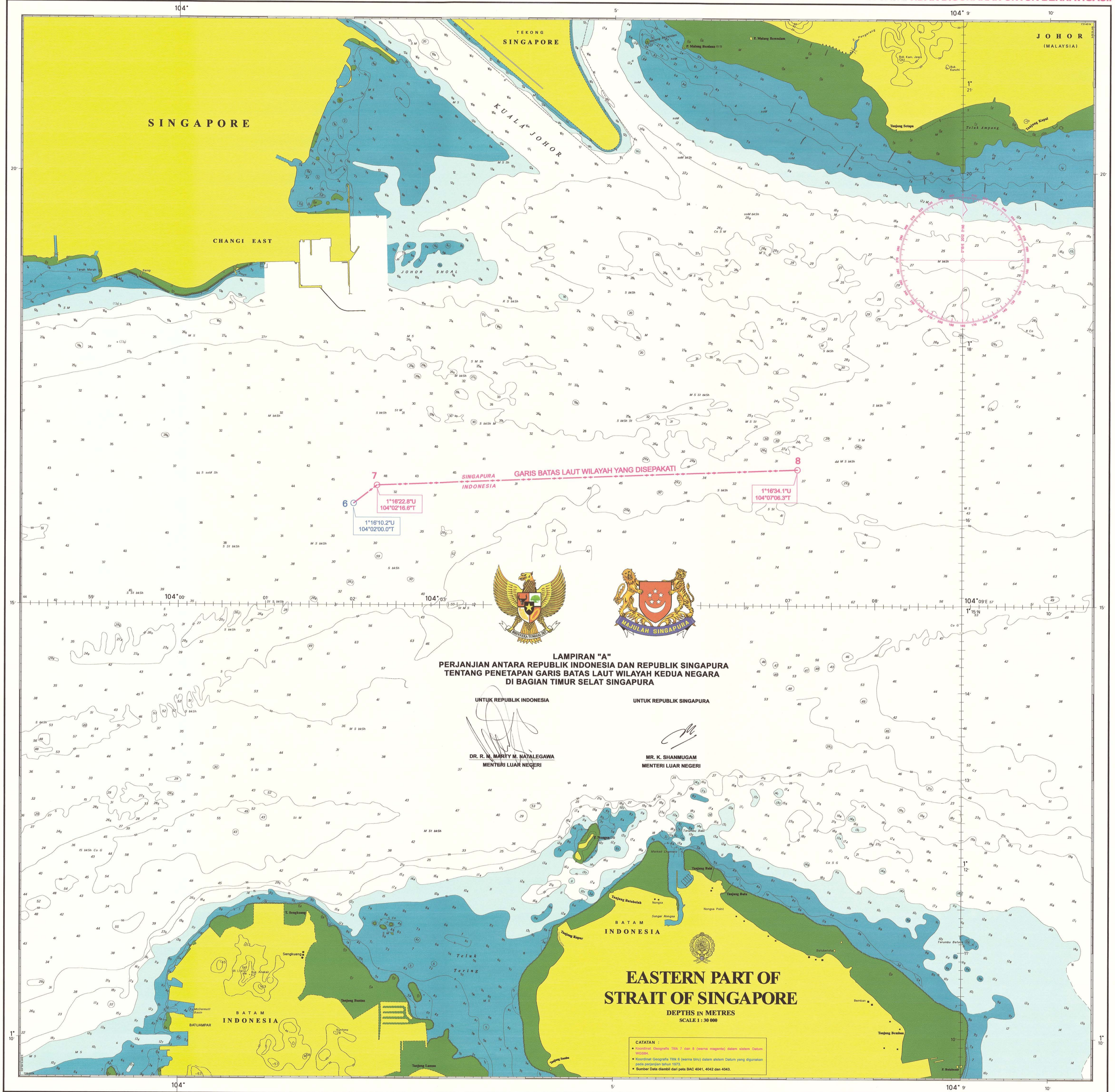
Menteri Luar Negeri

**Untuk Republik Singapura**



**MR. K. SHANMUGAM**

Menteri Luar Negeri



# LAMPIRAN "B"

WGS84

UNTUK TUJUAN ILLUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



CATATAN:  
• Koordinat Geografis Titik 7 dan 8 (warna magenta) dalam sistem Datum WGS84.  
• Koordinat Geografis Titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (warna biru) dalam sistem Datum yang digunakan pada perjanjian tahun 1973.  
• Koordinat Geografis Titik 1A, 1B dan 1C (warna biru dicetak miring) dalam sistem Datum WGS84.  
• Sumber Data diambil dari peta BAC 2403

## INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE SINGAPORE STRAIT AND EASTERN APPROACHES

DEPTHS IN METRES  
SCALE 1:200 000 at lat 1°15'

Depths are in metres and are reduced to Chart Datum, which is approximately the level of Lowest Astronomical Tide. Heights are in metres. Underlined figures are drying heights above Chart Datum. All other heights are above Mean High Water Springs or Mean Higher High Water. Positions are referred to WGS84 Datum. Navigational marks: IALA Maritime Buoyage System. Region A (Red top port). Projection: Mercator.



### LAMPIRAN "B" PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA

Disahkan oleh:  
  
DR. ASEF KARSIKI  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan oleh:  
  
LAKSMA TNI Drs. DEDE YULIADI, M.Sc.  
KEPALA DINAS HIDROGRAFI  
TNI ANGKATAN LAUT

Disahkan oleh:  
  
DR. PARRY DEE  
KEPALA HIDROGRAFI  
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Disahkan oleh:  
  
MR. SOH KIENG PENG  
KEPALA SURVEYOR  
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84



**REPUBLIK INDONESIA**

**TREATY  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE  
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS  
OF THE TWO COUNTRIES  
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

**THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,**

**NOTING** that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

**HAVING** partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as "1973 Treaty") and the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as "2009 Treaty"),

**CONSIDERING** further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

**DESIRING** to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

**PURSUANT THERETO**, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**



## ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

## ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

### ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

### ARTICLE 4

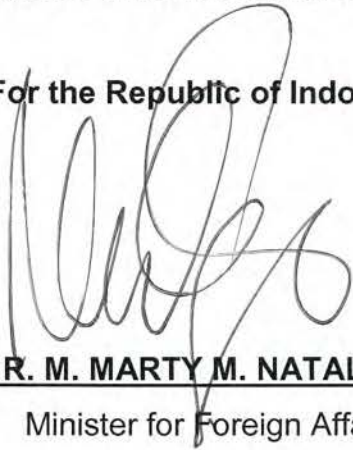
This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

### ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

**DONE IN DUPLICATE** at Singapore on 3 September 2014 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

**For the Republic of Indonesia**



**DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA**

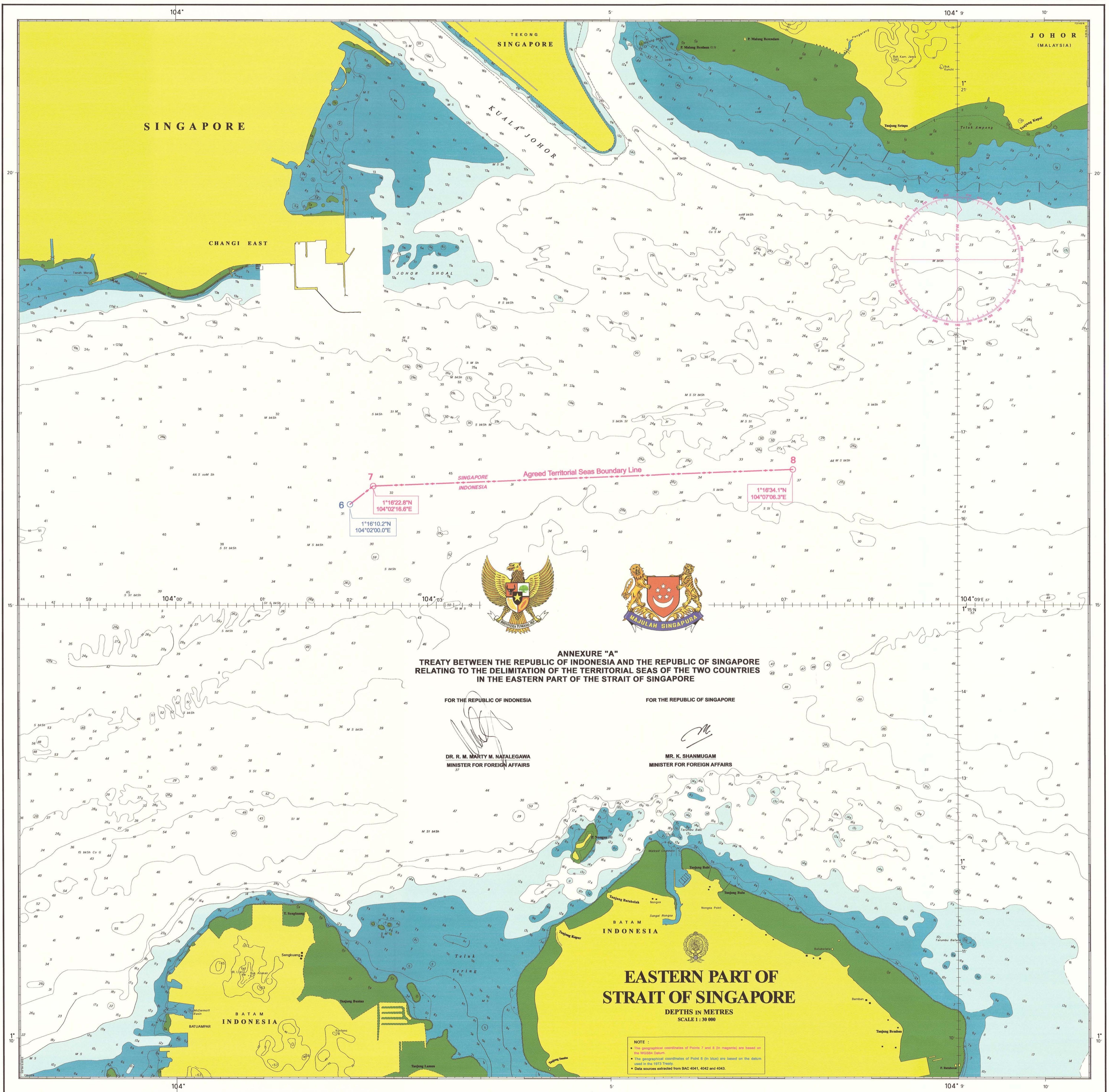
Minister for Foreign Affairs

**For the Republic of Singapore**



**MR. K. SHANMUGAM**

Minister for Foreign Affairs



**ANNEXURE "A"**  
**TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE**  
**RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES**  
**IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE REPUBLIC OF SINGAPORE

*[Signature]*  
**DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA**  
 MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

*[Signature]*  
**MR. K. SHANMUGAM**  
 MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

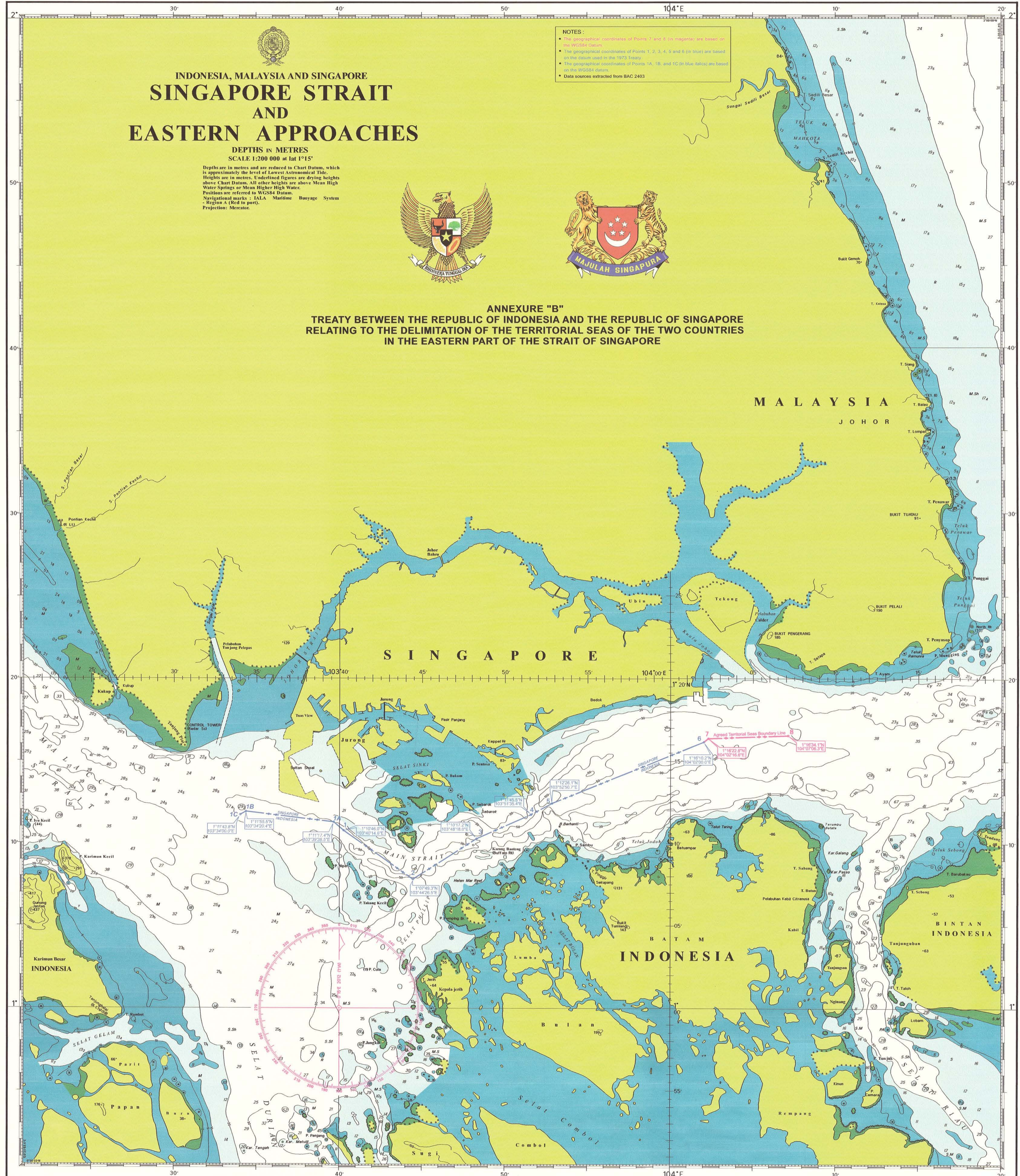
**EASTERN PART OF**  
**STRAIT OF SINGAPORE**  
 DEPTHS IN METRES  
 SCALE 1 : 30 000

**NOTE :**  
 • The geographical coordinates of Points 7 and 8 (in magenta) are based on the WGS84 Datum.  
 • The geographical coordinates of Point 6 (in blue) are based on the datum used in the 1973 Treaty.  
 • Data sources extracted from DAC 4041, 4042 and 4043.

# ANNEXURE "B"

WGS84

FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR NAVIGATION.

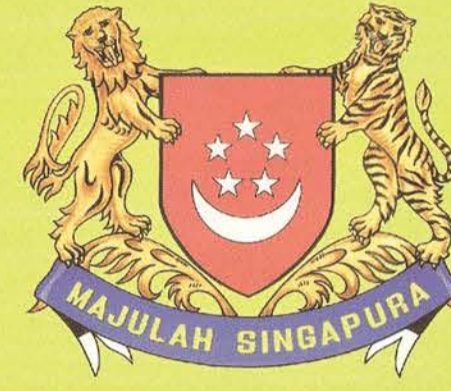


NOTES:  
• The geographical coordinates of Points 7 and 8 (in magenta) are based on the WGS84 datum.  
• The geographical coordinates of Points 1, 2, 3, 4, 5 and 6 (in blue) are based on the datum used in the 1973 Treaty.  
• The geographical coordinates of Points 1A, 1B, and 1C (in blue italics) are based on the WGS84 datum.  
• Data sources extracted from BAC 2403

## INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE SINGAPORE STRAIT AND EASTERN APPROACHES

DEPTHS IN METRES  
SCALE 1:200 000 at lat 1°15' N

Depths are in metres and are reduced to Chart Datum, which is approximately the level of Lowest Astronomical Tide. Heights are in metres. Underlined figures are drying heights above Chart Datum. All other heights are above Mean High Water Springs or Mean Higher High Water. Positions are referred to WGS84 Datum. Navigational marks: IALA Maritime Buoyage System - Region A (Red to port). Projection: Mercator.



### ANNEXURE "B" TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE

MALAYSIA  
JOHOR

SINGAPORE

INDONESIA

BINTAN  
INDONESIA

Certified by:   
DR. ASEP KARSIDI  
HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY  
REPUBLIC OF INDONESIA

Certified by:   
CORE. DRs. DEKE YULIANI, M.Sc.  
CHIEF HYDROGRAPHER  
HYDRO-OCEANOGRAPHIC SERVICE  
INDONESIAN NAVY

Certified by:   
DR. PARRY OEI  
CHIEF HYDROGRAPHER  
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Certified by:   
MR. SOH KHENG PENG  
CHIEF SURVEYOR  
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84



**PERJANJIAN  
ANTARA  
REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA  
NEGARA  
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

**REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA,**

**MENGINGAT** bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

**TELAH** menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 1973”) dan Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 2009”),

**MENIMBANG** lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

**BERHASRAT** untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

**DENGAN DEMIKIAN,** berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

## PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Singapura dan Republik Indonesia di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada  $1^{\circ} 16' 10.2''$  Utara dan  $104^{\circ} 02' 00.0''$  Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	$1^{\circ} 16' 10.2''$	$104^{\circ} 02' 00.0''$
7	$1^{\circ} 16' 22.8''$	$104^{\circ} 02' 16.6''$
8	$1^{\circ} 16' 34.1''$	$104^{\circ} 07' 06.3''$

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran "A"** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

## PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran "B"** pada Perjanjian ini.

### **PASAL 3**

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

### **PASAL 4**

Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

### **PASAL 5**

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

**DIBUAT DALAM RANGKAP DUA** di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Untuk Republik Singapura**



**MR. K. SHANMUGAM**

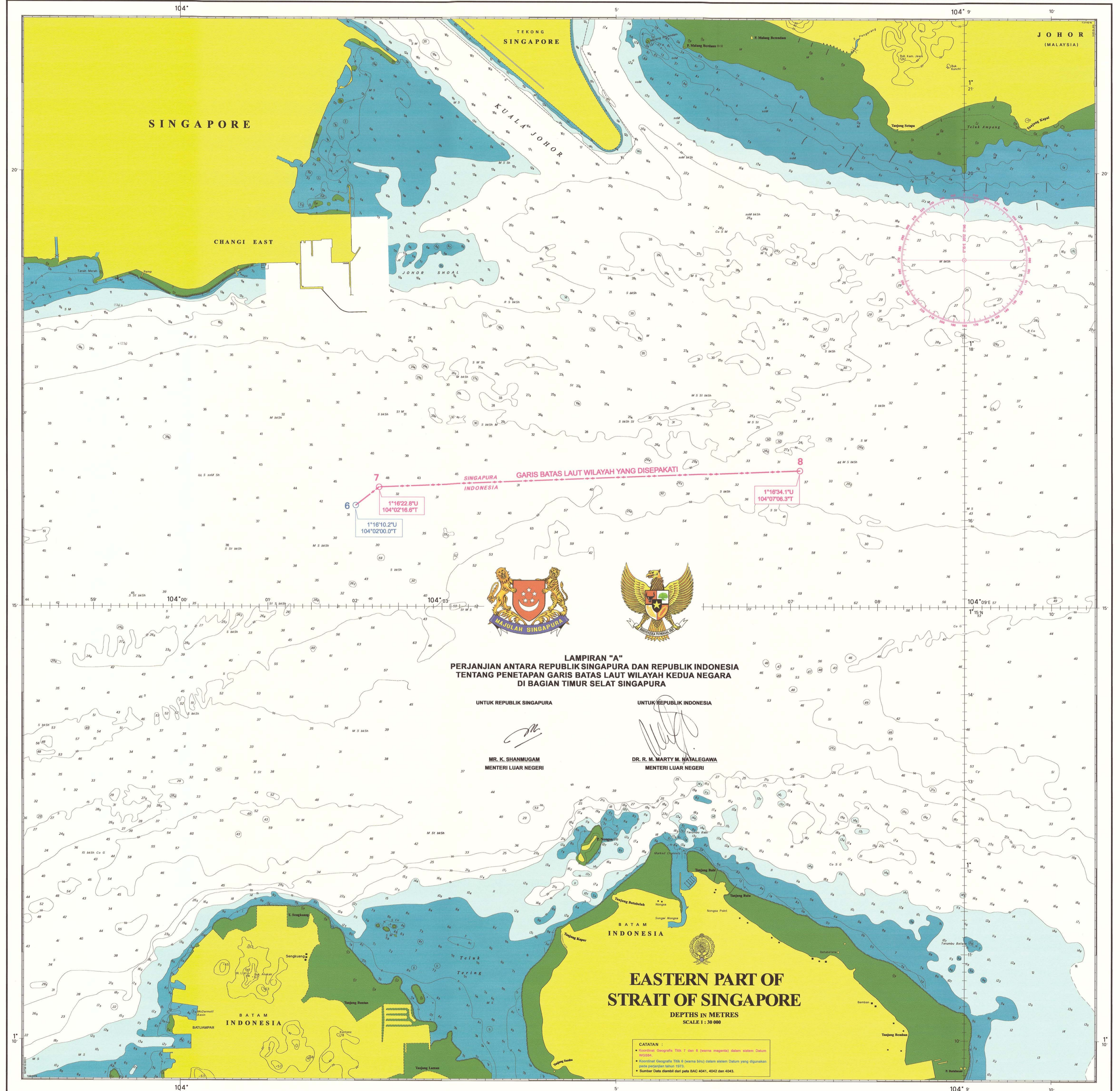
Menteri Luar Negeri

**Untuk Republik Indonesia**



**DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA**

Menteri Luar Negeri

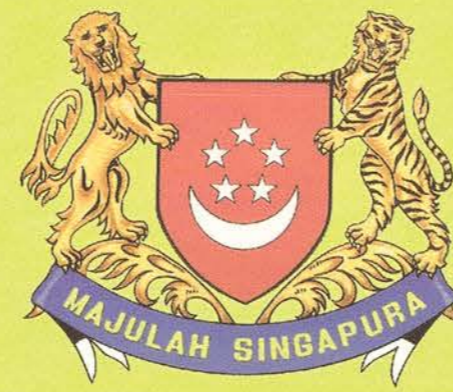






**CATATAN :**

- Koordinat Geografis Tok 7 dan 8 (warna magenta) dalam sistem Datum WGS84
- Koordinat Geografis Tok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (warna biru) dalam sistem Datum yang digunakan pada perjanjian tahun 1973
- Koordinat Geografis Tok 1A, 1B dan 1C (warna biru dicetak miring) dalam sistem Datum WGS84
- Sumber Data diambil dari peta BAC 2403



**LAMPIRAN "B"**  
**PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA**  
**DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**



**TREATY  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF  
INDONESIA  
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS  
OF THE TWO COUNTRIES  
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

**THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

**NOTING** that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

**HAVING** partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as “1973 Treaty”) and the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as “2009 Treaty”),

**CONSIDERING** further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

**DESIRING** to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

**PURSUANT THERETO**, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

## ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

## ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

### ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

### ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

### ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

**DONE IN DUPLICATE** at Singapore on 3 September 2014 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

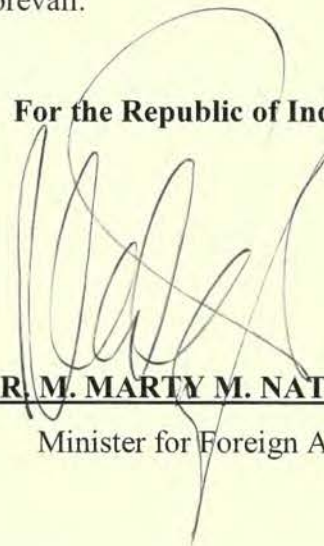
**For the Republic of Singapore**



**MR. K. SHANMUGAM**

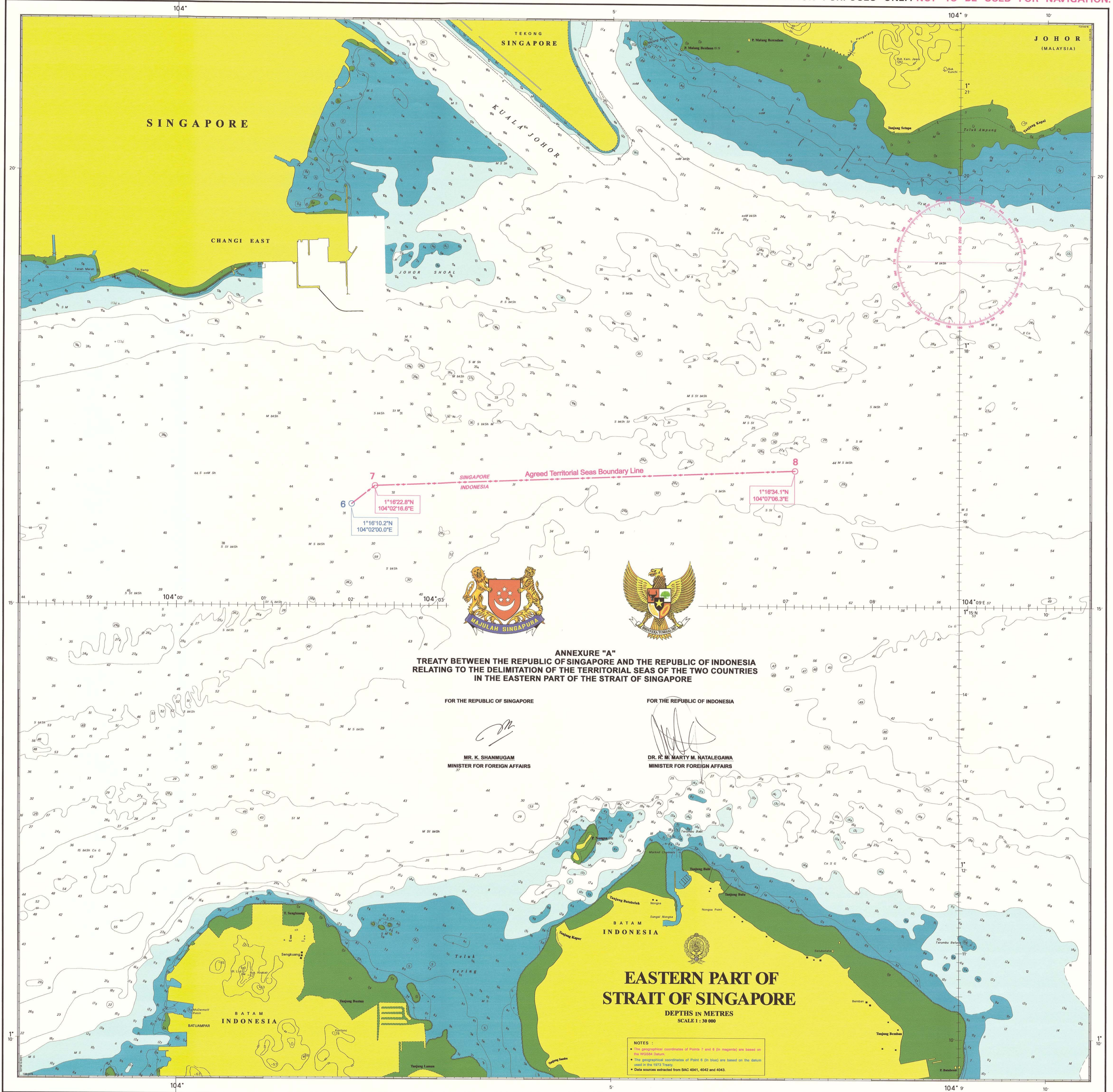
Minister for Foreign Affairs

**For the Republic of Indonesia**



**DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA**

Minister for Foreign Affairs





# ANNEXURE "B"


WGS84


FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR NAVIGATION.



Certified by:   
DR. PARRY DEL  
CHIEF HYDROGRAPHER  
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

  
MR. SOH KHENG PENG  
CHIEF SURVEYOR  
SINGAPORE LAND AUTHORITY

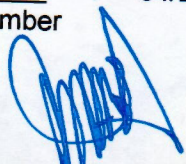
Certified by:   
DR. ASEP KARDI  
HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY  
REPUBLIC OF INDONESIA

  
DR. BEDE YULADI, M.Sc.  
CHIEF HYDROGRAPHER  
HYDRO-OCEANOGRAPHIC SERVICE  
INDONESIAN NAVY

WGS84

Salinan naskah resmi  
Certified True Copy

Nomor : 04/BK/TR/01/2017/CTC  
Number



**Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman**  
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
Secretary of Director General of Law and Treaties  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 18 Januari 2017  
Date